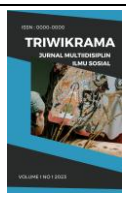
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



SPBE DAN MODERNISASI BIROKRASI: KAJIAN LITERATUR MENGENAI TANTANGAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL DAN GOVERNANCE DIGITAL

Cicilia Pily Andesca[1] Abdal[2]
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2025
Revised Desember 2025
Accepted Desember 2025
Available online Desember 2025

Email:
ciciliapily@gmail.com



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abtrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka modernisasi birokrasi dan penguatan governance digital di Indonesia melalui metode studi literatur. Fokus kajian mencakup tiga aspek, yaitu tantangan integrasi layanan digital di tingkat pemerintah daerah, kontribusi SPBE terhadap modernisasi birokrasi, serta strategi dan faktor penentu keberhasilan implementasi SPBE pada berbagai konteks lokal. Sumber data terdiri dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan resmi pemerintah, termasuk Laporan Indeks SPBE Nasional 2023 serta laporan kinerja instansi 2024. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan penerapan triangulasi sumber untuk menjaga validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama integrasi SPBE di pemerintah daerah mencakup fragmentasi sistem, keterbatasan infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia yang bervariasi. SPBE terbukti berperan penting dalam modernisasi birokrasi, khususnya dalam meningkatkan efisiensi layanan publik, interoperabilitas sistem, dan akuntabilitas pemerintahan. Strategi keberhasilan implementasi SPBE meliputi penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, serta investasi berkelanjutan pada teknologi digital. Temuan ini memberikan wawasan mengenai SPBE sebagai instrumen transformasi birokrasi dan menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan pengembangan layanan digital terpadu.

Kata kunci: SPBE, modernisasi birokrasi, governance digital, integrasi layanan digital, studi literatur

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) as a means of bureaucratic modernization and the enhancement of digital governance in Indonesia, using a literature review approach. The study focuses on three main aspects: the challenges of integrating digital services at the regional government level, the contribution of SPBE to bureaucratic modernization, and the strategies and success factors for SPBE implementation in various local contexts. The data sources include scholarly journals, government policy documents, and official reports, including the 2023 National SPBE Index Report and 2024 institutional performance reports. The analysis was conducted using a descriptive-qualitative approach with source triangulation to ensure the validity of findings. The results indicate that the primary challenges for SPBE integration in regional governments include system fragmentation, infrastructure limitations, and varying levels of human resource readiness. SPBE plays a crucial role in bureaucratic modernization, particularly in improving public service efficiency, system interoperability, and government accountability. Successful implementation strategies involve strengthening governance, enhancing human resource competencies, and sustained investment in digital technology. These findings provide insights into SPBE as an instrument of bureaucratic transformation and serve as a reference for policy development in integrated digital service management.

Keywords: SPBE, bureaucratic modernization, digital governance, digital service integration, literature review

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik pemerintahan yang kompleks, dengan lebih dari 500 kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh provinsi. Realitas geografis ini berkontribusi pada disparitas kapasitas administratif antar daerah, di mana beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang kompeten. Penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur SPBE masih rendah, dengan masalah jaringan internet dan perangkat teknologi yang belum

memadai serta minimnya kapasitas SDM TIK di pemerintahan daerah (Ulayya et al., 2025). Kondisi tersebut menuntut strategi kebijakan yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga disesuaikan dengan konteks lokal agar layanan publik dapat dijalankan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diangkat sebagai instrumen strategis untuk modernisasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan. Tujuan SPBE adalah membangun pemerintahan yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efisien, responsif, dan adaptif (Hadi & Widnyani, 2024). Implementasi SPBE diharapkan mampu mengurangi fragmentasi layanan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat akuntabilitas dan partisipasi publik(Ilham et al., 2025).

Meskipun potensinya besar, banyak pemerintah daerah menghadapi hambatan signifikan dalam mengimplementasikan SPBE secara terintegrasi. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur TIK, integrasi sistem yang lemah, literasi digital ASN yang rendah, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung perubahan digital (Subhan & Sartika, 2025). Selain itu, kolaborasi lintas pemerintah daerah dan kepemimpinan digital menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan implementasi SPBE (Ahad & Barsei, 2023). Studi lain menegaskan bahwa penerapan SPBE berdampak positif terhadap percepatan layanan publik, kemudahan akses informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat, meskipun disparitas kematangan SPBE antarinstansi masih terlihat (Nastia, 2025).

Penelitian sebelumnya menekankan kendala-kendala tersebut, tetapi sebagian besar bersifat parsial, misalnya hanya membahas aspek teknis atau SDM saja, tanpa memberikan sintesis menyeluruh mengenai hambatan, strategi mitigasi, dan dampak SPBE terhadap modernisasi birokrasi. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya kajian literatur yang menyeluruh untuk menilai SPBE sebagai studi kasus birokrasi modern dalam konteks governance digital. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan kajian: bagaimana tantangan integrasi layanan digital SPBE di pemerintah daerah, bagaimana peran SPBE dalam modernisasi birokrasi dan governance digital, serta strategi dan faktor apa yang menentukan keberhasilan implementasinya di berbagai konteks lokal.

Artikel ini bertujuan menjawab rumusan masalah tersebut melalui pendekatan studi literatur dengan mengidentifikasi tantangan, menganalisis peran SPBE dalam transformasi birokrasi modern, serta menyintesis strategi dan faktor keberhasilan implementasi. Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada penggabungan perspektif birokrasi modern dan governance digital dari literatur terkini, sekaligus menyajikan kerangka konseptual integrasi SPBE sebagai alat modernisasi birokrasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai SPBE sebagai studi kasus birokrasi modern sekaligus rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas governance digital di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Birokrasi Modern

Birokrasi modern menuntut pola kerja pemerintahan yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis teknologi. Sistem yang sebelumnya serba manual kini didorong menjadi terdigitalisasi demi menciptakan layanan publik yang lebih cepat dan akuntabel. Salah satu instrumen penting

dalam proses modernisasi ini adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Anugerah & Parwanti (2024) menunjukkan bahwa implementasi SPBE mampu mempercepat proses reformasi birokrasi karena digitalisasi memperkecil prosedur berbelit, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki responsivitas layanan. Penelitian lain oleh Fahmi et al. (2021)juga menegaskan bahwa SPBE bukan hanya proyek teknologi, tetapi merupakan inovasi kelembagaan yang membutuhkan perubahan pola pikir birokrat, kepemimpinan yang mendukung, serta koordinasi erat antarinstansi.

Governance Digital

Governance digital mencakup bagaimana pemerintah menggunakan teknologi untuk membangun tata kelola yang transparan, partisipatif, dan efisien. Penerapan SPBE menjadi contoh praktik governance digital yang nyata dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia.

Wardana et al. (2025) menemukan bahwa digitalisasi pelayanan di Kabupaten Sumedang memperkuat prinsip-prinsip good governance, seperti keterbukaan informasi, peningkatan efisiensi, serta kemudahan partisipasi publik. Tantangan seperti ego sektoral atau gap digital tetap ada, namun manfaat digitalisasi terlihat signifikan. Sementara (Cahyani & Putra, 2024) menekankan bahwa penerapan virtual office di Provinsi Bali merupakan bentuk transformasi governance digital yang mendukung efektivitas kerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan berbasis teknologi.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan kerangka nasional untuk mengintegrasikan teknologi informasi di seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya bukan sekadar digitalisasi, tetapi membangun ekosistem pemerintah yang saling terhubung, efisien, dan transparan. (Ilham et al., 2025)menyatakan bahwa SPBE merupakan fondasi penting dalam membangun good governance karena mampu mempercepat layanan, mengurangi biaya operasional, serta meminimalkan potensi penyimpangan administrasi.

Asianto et al., (2023)menambahkan bahwa keberhasilan SPBE ditentukan oleh sinkronisasi berbagai komponennya, seperti arsitektur data, standar aplikasi, keamanan sistem, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Sutejo et al., (2023), melalui studi di Tangerang, memperlihatkan bahwa tingkat kematangan SPBE daerah masih menghadapi hambatan, terutama terkait integrasi sistem pusat–daerah dan manajemen risiko.

Integrasi Layanan Digital dalam SPBE

Integrasi layanan digital adalah bagian penting SPBE yang bertujuan membuat layanan antarinstansi dan antarlevel pemerintahan saling terhubung. Tanpa integrasi, digitalisasi hanya menghasilkan sistem yang berjalan sendiri-sendiri (silo).

Maryuni et al., (2024) melalui studi di Kubu Raya menemukan bahwa keberhasilan integrasi layanan digital dalam SPBE dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk swasta dan akademisi. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi bukan sekadar aspek teknis, tetapi juga kolaboratif. (Sundari et al., 2024) menunjukkan bahwa inovasi SPBE berbasis kecerdasan buatan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi kendala berupa kapasitas SDM, keamanan data, dan integrasi lintas instansi,

sehingga koordinasi dan standardisasi data menjadi kebutuhan mendesak dalam perwujudan smart governance.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **studi literatur**, yaitu metode yang menelaah berbagai sumber tertulis untuk memperoleh pemahaman konseptual dan empiris terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan modernisasi birokrasi. Studi literatur memungkinkan peneliti memetakan temuan empiris sekaligus teori yang relevan mengenai integrasi layanan digital dan governance digital. Pendekatan ini dianggap tepat karena topik SPBE telah banyak diteliti melalui evaluasi nasional, laporan instansi, dan publikasi akademik yang terdokumentasi secara sistematis (Prastiwi, 2025).

Sumber Data

Sumber data penelitian bersifat sekunder dan berasal dari beberapa jenis dokumen. Pertama, jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas e-government, SPBE, modernisasi birokrasi, digital governance, dan integrasi layanan digital. Artikel-artikel ini diperoleh melalui Google Scholar, Portal Garuda, dan OJS menggunakan kata kunci seperti *"SPBE pemerintah daerah"*, *"integrasi layanan digital"*, *"digital governance"*, dan *"e-government Indonesia"*.

Kedua, dokumen kebijakan dan laporan resmi pemerintah yang relevan, termasuk Laporan Indeks SPBE Nasional 2021–2024 yang diterbitkan oleh KemenPANRB, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Dokumen ini menyediakan data empiris mengenai capaian SPBE di tingkat nasional dan daerah serta standar regulasi yang berlaku.

Ketiga, literatur akademik internasional, termasuk kajian Layne & Lee (2001)mengenai tahapan e-government, menekankan pentingnya integrasi horizontal dan vertikal untuk menciptakan sistem pemerintahan digital yang menyeluruh.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah identifikasi, di mana peneliti melakukan pencarian sistematis untuk menemukan artikel, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan SPBE, modernisasi birokrasi, governance digital, dan integrasi layanan digital. Tahap kedua adalah seleksi, yaitu memilih literatur yang relevan dengan fokus penelitian, diterbitkan antara 2018–2024, dan mengandung temuan empiris yang dapat dianalisis. Tahap ketiga adalah penelaahan, di mana dokumen yang terpilih dianalisis untuk mengekstrak informasi terkait capaian SPBE, tantangan integrasi layanan, peran SPBE dalam modernisasi birokrasi, dan strategi keberhasilan implementasi di berbagai konteks lokal.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, data direduksi dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama, seperti tantangan integrasi digital, kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, arsitektur SPBE, serta strategi implementasi. Kedua, data disajikan secara naratif dan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi empiris SPBE di tingkat nasional maupun daerah. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan melalui sintesis literatur untuk menjawab

rumusan masalah penelitian, khususnya mengenai peran SPBE sebagai instrumen modernisasi birokrasi dan governance digital.

Validitas Data

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan. Pendekatan ini memastikan keandalan data dan konsistensi informasi (Setiadi, 2022). Data capaian SPBE divalidasi melalui Laporan SPBE Nasional dan evaluasi instansi pemerintah, sementara temuan mengenai kendala integrasi diperkuat melalui penelitian empiris terkait implementasi e-government di pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Integrasi Layanan Digital SPBE di Pemerintah Daerah

Integrasi layanan digital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala. Evaluasi SPBE Nasional menunjukkan bahwa indeks meningkat dari 2,34 pada 2022 menjadi 2,79 pada 2023 (KemenPANRB), 2023). Meskipun tren ini menunjukkan kemajuan digitalisasi, capaian tertinggi hanya berada pada Domain Layanan (3,45), sedangkan Domain Tata Kelola (2,27) dan Domain Manajemen (1,65) masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa penyediaan layanan digital belum diimbangi dengan kemampuan koordinasi, manajemen data, dan penyelarasan proses lintas perangkat daerah.

Menurut (Layne & Lee, 2001), integrasi e-government membutuhkan *horizontal* dan *vertical integration*. Di tingkat daerah, integrasi horizontal sering terhambat karena setiap perangkat daerah memiliki sistem sendiri-sendiri yang belum distandardisasi, sementara integrasi vertikal terkendala oleh perbedaan platform dan kebijakan data antara kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, kesiapan SDM, dan budaya birokrasi menjadi faktor yang memperlambat integrasi layanan digital secara menyeluruh (Subhan & Sartika, 2025).

Indikator / Domain	Nilai	Implikasi terhadap Integrasi	Sumber
Indeks SPBE Nasional 2023	2,79	Peningkatan terjadi, namun integrasi antardomain masih belum merata	KemenPANRB, 2023
Domain Layanan SPBE 2023	3,45	Layanan digital sudah berjalan, tetapi integrasi lintas OPD belum optimal	LAKIP SPBE 2023

Domain Tata Kelola SPBE 2023	2,27	Standardisasi prosedur dan koordinasi lintas instansi masih lemah	LAKIP SPBE 2023
Domain Manajemen SPBE 2023	1,65	Kapasitas pengelolaan data dan SDM digital rendah, menghambat integrasi	LAKIP SPBE 2023
Nilai SPBE Provinsi Kalimantan Timur 2024	3,79	Integrasi lebih baik karena perencanaan arsitektur SPBE dan kepemimpinan yang kuat	Diskominfo Kaltim, 2024
Nilai SPBE BNPP RI 2024	3,75	Instansi pusat memiliki kesiapan manajerial dan teknis lebih tinggi	BNPP RI, 2024

Tabel 4.1 *Kondisi Domain SPBE dan Implikasinya terhadap Integrasi Digital*

Analisis Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tantangan integrasi SPBE di pemerintah daerah mencakup beberapa dimensi. Nilai tinggi pada Domain Layanan menandakan layanan digital sudah tersedia, namun belum otomatis terhubung dengan domain lain sehingga alur layanan masih terfragmentasi. Domain Tata Kelola yang rendah menyoroti kelemahan dalam standardisasi prosedur, koordinasi, dan kepatuhan terhadap regulasi, yang menjadi hambatan utama integrasi horizontal maupun vertikal.

Rendahnya Domain Manajemen menunjukkan keterbatasan kapasitas pengelolaan data, pemeliharaan sistem, dan pengembangan SDM digital, yang memperlambat integrasi. Capaian tinggi pada daerah seperti Kalimantan Timur dan instansi pusat seperti BNPP membuktikan bahwa integrasi dapat tercapai apabila terdapat kepemimpinan efektif, arsitektur sistem yang terencana, dan penguatan kapasitas SDM serta teknologi.

Secara keseluruhan, tantangan integrasi SPBE bersifat multidimensional, meliputi fragmentasi sistem, lemahnya tata kelola, kapasitas manajemen yang rendah, serta ketidaksiapan infrastruktur dan SDM. Upaya peningkatan integrasi digital harus dilakukan secara holistik, menggabungkan penyelarasan domain layanan, tata kelola, manajemen, serta koordinasi lintas instansi agar layanan publik dapat terintegrasi secara menyeluruh.

Peran SPBE dalam Modernisasi Birokrasi dan Governance Digital

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi tonggak penting modernisasi birokrasi di Indonesia. SPBE berfungsi bukan sekadar sebagai platform layanan publik digital, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat governance digital

melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi pemerintahan. Berdasarkan evaluasi SPBE nasional 2023, nilai indeks keseluruhan mencapai 2,79, sedangkan Domain Layanan memperoleh nilai 3,45, menandakan bahwa layanan publik digital telah relatif matang dan dapat diakses dengan cepat serta responsif. Namun, nilai Domain Manajemen yang masih 1,65 menegaskan bahwa integrasi lintas unit dan pengelolaan sistem elektronik masih menjadi tantangan signifikan.

Hasil ini sejalan dengan temuan (Prastiwi, 2025), yang menekankan bahwa digitalisasi birokrasi memang mendorong efisiensi administrasi, tetapi keberhasilan modernisasi membutuhkan perbaikan dalam manajemen teknologi informasi, tata kelola, dan interoperabilitas antarunit. Pemerintah daerah dengan tata kelola digital yang baik cenderung mampu menyediakan layanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Penerapan SPBE di tingkat lokal dan pusat memperlihatkan hasil yang konkret. Provinsi Kalimantan Timur mencatat nilai 3,79, menunjukkan keberhasilan integrasi layanan digital antarorganisasi perangkat daerah. Di tingkat pusat, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan memperoleh nilai 3,93 dan 3,99, mencerminkan sistem SPBE yang terintegrasi, interoperabilitas lintas unit, serta tata kelola digital yang efektif. Sementara itu, Kabupaten Rembang dengan nilai 3,64 menjadi contoh daerah yang berhasil mengimplementasikan layanan digital terintegrasi di tingkat kabupaten.

Instansi / Level Pemerintahan	Tahun	Nilai SPBE	Predikat	Relevansi terhadap Modernisasi Birokrasi dan Governance Digital
Indeks SPBE Nasional	2023	2,79	Baik	Menunjukkan transformasi digital nasional sebagai fondasi modernisasi birokrasi.
Domain Layanan SPBE Nasional	2023	3,45	Sangat Baik	Menandakan kesiapan layanan publik digital yang efisien dan transparan.
Provinsi Kalimantan Timur	2024	3,79	Sangat Baik	Modernisasi birokrasi daerah berhasil melalui integrasi layanan digital.
Kementerian Luar Negeri	2024	3,93	Sangat Baik	Governance digital tingkat pusat dengan interoperabilitas sistem yang baik.
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	2024	3,99	Sangat Baik	Manajemen SPBE modern dan transparansi layanan lintas unit.
Kabupaten Rembang	2024	3,64	Sangat Baik	Integrasi layanan digital di tingkat kabupaten berhasil diterapkan.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Tabel 4.2. *Peran SPBE dalam Modernisasi Birokrasi dan Governance Digital (Data Nasional & Contoh Lokal / Instansi)*

Analisis tabel memperlihatkan bahwa SPBE memiliki peran penting dalam mendorong modernisasi birokrasi. Nilai tinggi pada instansi pusat dan provinsi menandakan kemampuan mengelola integrasi data lintas unit serta meningkatkan governance digital. Perbedaan nilai pada tingkat nasional menandakan bahwa transformasi digital masih bervariasi antarwilayah, sehingga SPBE tetap menjadi instrumen penting untuk menyatukan teknologi, sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan.

Strategi dan Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi SPBE

Keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di pusat maupun daerah sangat bergantung pada strategi yang menyeluruh dan sejumlah faktor kunci pendukung. Strategi efektif mencakup integrasi sistem secara bertahap, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta penguatan koordinasi dan regulasi lintas unit. Studi literatur menunjukkan bahwa daerah yang memiliki roadmap digitalisasi jelas dan sistematis cenderung lebih berhasil mewujudkan layanan digital yang terintegrasi dan efisien (Prastiwi, 2025).

Salah satu faktor paling penting adalah kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang visioner dan mendukung inovasi mampu mendorong adopsi teknologi secara konsisten, menginspirasi pegawai, dan mengatasi resistensi birokrasi terhadap perubahan digital. Kajian literatur tentang kepemimpinan di sektor publik menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memperkuat komitmen pegawai dan mempercepat transformasi digital birokrasi (Cahaya et al., 2025).

Faktor berikutnya adalah kesiapan infrastruktur dan interoperabilitas sistem. Infrastruktur yang memadai—termasuk jaringan internet stabil, server, pusat data, serta aplikasi yang kompatibel antarunit—memungkinkan SPBE beroperasi secara lancar. Daerah yang kekurangan infrastruktur cenderung mengalami fragmentasi layanan, sehingga integrasi digital tidak optimal.

Pengembangan kompetensi SDM juga menjadi penentu utama. Literasi digital, kemampuan manajemen data, dan pemahaman prosedur SPBE harus terus ditingkatkan agar aparatur mampu mengoperasikan sistem digital secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kompetensi SDM dan kepemimpinan transformasional berperan penting dalam adaptasi teknologi dan perubahan budaya birokrasi.

Terakhir, penguatan kebijakan dan tata kelola internal turut menentukan keberhasilan implementasi. Regulasi yang jelas terkait interoperabilitas sistem, keamanan data, dan prosedur kolaborasi antarinstansi memungkinkan SPBE berfungsi sebagai instrumen modernisasi birokrasi, bukan sekadar sistem teknologi. Sinergi kebijakan, teknologi, dan partisipasi publik menjadi kunci agar transformasi digital birokrasi berjalan berkelanjutan (Setiadi, 2022).

Secara keseluruhan, strategi implementasi SPBE yang sukses mencakup empat elemen inti: kepemimpinan visioner, infrastruktur dan interoperabilitas sistem, pengembangan SDM digital, dan regulasi internal yang adaptif. Kombinasi faktor-faktor ini memungkinkan SPBE tidak hanya menghadirkan layanan digital, tetapi juga memperkuat modernisasi birokrasi dan governance digital di berbagai konteks pemerintahan.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur serta evaluasi SPBE nasional 2023 dan contoh instansi/daerah 2024, beberapa kesimpulan utama dapat dirumuskan:

a. Tantangan Integrasi Layanan Digital di Pemerintah Daerah
Integrasi layanan digital di tingkat daerah masih menghadapi kendala signifikan. Fragmentasi sistem, terbatasnya interoperabilitas data, lemahnya tata kelola lintas unit, infrastruktur yang tidak merata, serta keterbatasan kompetensi SDM menjadi hambatan utama. Meski beberapa daerah seperti Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Rembang berhasil mengimplementasikan layanan digital terintegrasi, sebagian besar pemerintah daerah masih beroperasi dalam sistem parsial sehingga pengalaman pelayanan publik belum konsisten.
b. Peran SPBE dalam Modernisasi Birokrasi dan Governance Digital
SPBE menjadi instrumen penting dalam modernisasi birokrasi dan penguatan governance digital. Hasil evaluasi menunjukkan domain layanan memiliki capaian tinggi, menandakan kemajuan layanan publik digital, sementara domain manajemen masih rendah, yang menegaskan perlunya peningkatan integrasi, interoperabilitas, dan tata kelola. Contoh instansi pusat, seperti Kementerian Luar Negeri dan KLHK, menunjukkan bahwa sistem digital yang terintegrasi dan tata kelola yang baik mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan.
c. Strategi dan Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi SPBE
Keberhasilan implementasi SPBE dipengaruhi oleh strategi yang matang dan faktor pendukung, meliputi: kepemimpinan visioner, kesiapan infrastruktur dan interoperabilitas sistem, pengembangan kompetensi SDM, serta penguatan regulasi dan tata kelola internal. Kombinasi faktor ini memungkinkan SPBE meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat modernisasi birokrasi dan governance digital di berbagai konteks pemerintahan.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

a. Penguatan Integrasi Layanan
Pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi horizontal dan vertikal antarunit dengan standarisasi data, penggunaan platform yang interoperabel, dan koordinasi rutin antarperangkat daerah serta instansi pusat.
b. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kepemimpinan
Pelatihan literasi digital, manajemen data, dan kepemimpinan transformasional perlu menjadi prioritas. Pimpinan daerah dan instansi sebaiknya menjadi agen perubahan yang mendorong adopsi teknologi digital secara konsisten.
c. Pengembangan Infrastruktur dan Standar Sistem
Pemerintah harus menjamin tersedianya infrastruktur digital yang memadai, termasuk jaringan, server, dan pusat data, agar integrasi layanan dapat berjalan lancar dan merata.

d. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola
Regulasi yang jelas terkait interoperabilitas, keamanan data, dan tata kelola lintas unit harus diterapkan, serta disertai monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas implementasi dan perbaikan berkelanjutan.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, SPBE dapat berfungsi lebih optimal sebagai instrumen modernisasi birokrasi dan governance digital, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ahad, M. P. Y., & Barsei, A. N. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK: BEST PRACTICE DARI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TIMUR. *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI*, *13*(1).

Anugerah, F. Y., & Parwanti, L. S. (2024). Reformasi Birokrasi melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Diskominsta Kota Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, *8*(2), 124–135. https://doi.org/10.31002/jpalg.v8i2.2026

Asianto, A., Fatonah, N. S., Firmansyah, G., & Akbar, H. (2023). Journal Series on Governance and Management of IT in Electronic-Based Government Systems (SPBE) in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *4*(09). http://jiss.publikasiindonesia.id/

Cahaya, Alista, D., & Nurhayani, P. (2025). Kepemimpinan Transformasional dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Sektor Publik: Kajian Literatur. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, *2*(4), 28–37. https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i4.1297

Cahyani, N. P. K., & Putra, I. P. A. P. (2024). Governance And Digital Transformation: Analisis Ruang Kerja Virtual Melalui Perspektif E-Government Pada Pemerintahan Provinsi Bali. *Public Sphere Review: Journal of Public Administration*, *3*(1), 1–11. https://doi.org/10.30649/psr.v3i1.123

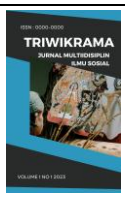
Fahmi, A., Perdanaputra, D., & Komaria, S. (2021). Bureaucratic Innovation in the Smart City Era: An Analysis of the Implementation of the Electronic Based Government System (SPBE). *JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS*, *06*(02).

Hadi, I., & Widnyani, I. A. P. S. (2024). Modernisasi dan Digitalisasi Public Servis: Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Harmonisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI*, *6*(2).

Ilham, A. R., Dewi, Y. S., & Gusty, R. (2025). SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) SEBAGAI PILAR GOOD GOVERNANCE: REFLEKSI TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *23*(1). https://doi.org/10.46730/jiana.v20i2

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). (2023). *Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023*.

Layne, K., & Lee, J. (2001). *Developing Fully Functional E-Government: A Four-Stage Model*. *18*.



Maryuni, S., Pardi, Darmawan, D., Apriyani, E., Rudianto, Zesa, P., & Selpiani, W. (2024). Transformasi pelayanan digital terpadu dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, *5*(4), 1011–1028. https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22479

Nastia. (2025). OPTIMALISASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN. *Humanis*, *17*(2).

Prastiwi, R. (2025). Reformasi Birokrasi Digital: Mendorong Efisiensi Pelayanan Publik di Era 4.0. *Jurnal Ijtihad*, *2*(1).

Setiadi, A. (2022). ANALISIS DIGITAL LEADERSHIP DAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*.

Subhan, & Sartika, I. (2025). Tantangan dan Strategi Implementasi SPBE dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *7*(6). https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6

Sundari, Nonci, N., & Sinrang, A. (2024). Transformasi SPBE Menuju Smart Governance Berbasis Kecerdasan Buatan Di Sidenreng Rappang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, *3*(2). https://doi.org/10.55850/simbol.v2i1

Sutejo, B. S. I., Widodo, A. M., Firmansyah, G., & Tjahyono, B. (2023). Risk Management Domain Application Plan Electronic Based Governance System (SPBE) Case Study: Tangerang Government Communications and Informatics Service. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *4*(09). http://jiss.publikasiindonesia.id/

Ulayya, A. S., Fahlevvi, M. R., & Rizqi, I. N. (2025). Menilai Kesiapan Infrastruktur Untuk Implementasi E- Government Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya. *JSI (Jurnal Sistem Informasi)*.

Wardana, R., Meilya, K. A., & Fatati, K. (2025). Good Governance di Era Digital: Pemerintah Kabupaten Sumedang Sebagai Model Transformasi Pelayanan Publik. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, *7*(1), 66–80. https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i1.5094